

## PARADIGMA NAHDLATUL 'ULAMA TERHADAP MODERNISASI

A. Sunarto AS<sup>\*)</sup>

### Abstrak.

*Islam in Indonesia has been running quite unique, from the beginning of Islam so easy and quick to respond, followed by the public until after the battle of thought put Islam in the public sphere. So many conceptual contribution is expected to respond to the needs of people from various Islamic thinkers, even by young Muslims. And in this paper, the authors also conducted an in-depth study to search the Islamic identity that can be felt responsive and grounded in the soil of Indonesia. Studies done by dissecting the religious rules, "al-muhafazhah 'ala al-qadim al-Salih al-akhdu wa bi al-jadid al-ashlah" and produce a pattern of thinking that should Islamization is based on substantial study, contextual, rational, and the earthiness that gave birth to Islamic thought in Indonesia responsive. NU is an organization that seeks to hold the renewal and modernization in all fields. so with that, it is not always referred to as a traditional Islamic organization.*

**Kata Kunci:** Islam Indonesia, Identitas Islam, Organisasi, Modernisasi, Tradisional.

### Pengertian Modernisasi

Modernitas sebagai gerakan pembaharuan yang berawal di Eropa menawarkan cara pandang baru terhadap fenomena kebudayaan. Modernitas muncul sebagai sejarah penaklukan nilai-nilai lama abad pertengahan oleh nilai-nilai baru modernis. Kekuatan rasional digunakan untuk memecahkan segala persoalan kemanusiaan dan menguji kebenaran lain seperti wahyu dan mitos tradisional.

Dalam masyarakat Barat "modernisme" mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai

---

<sup>\*)</sup> Dr. H. A. Sunarto AS, M.Ei adalah dosen tetap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni

dengan pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>1</sup>

Modernisasi ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Arnold Toynbee (seorang ahli sejarah), mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak akhir abad ke lima belas ketika orang Barat "*berterima kasih bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri karena ia telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen abad pertengahan*".<sup>2</sup>

Sedangkan Fazlur Rahman,<sup>3</sup> sarjana asal Pakistan mendefinisikan modernisasi dengan "*usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi yang berlangsung di dunia Islam*".

Menurut Samuel Huntington, modernitas adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membentuk serta mengendalikan alam. Modernitas ditandai dengan proses perubahan yang sangat cepat dengan melibatkan industrialisasi, urbanisasi, dari suatu masyarakat primitif menuju masyarakat berperadaban.<sup>4</sup>

Pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal itu berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliah (rasional), dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya-guna dan efisiensi yang maksimal.... Jadi sesuatu dapat disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.<sup>5</sup>

Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita menolak *westernisme*. Dan *westernisme* yang kita maksudkan itu ialah bahwa suatu keseluruhan paham yang membentuk suatu *total way of life*, di mana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 181.

<sup>2</sup> Lihat, Arnold Toynbee, dalam Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin*, Op.Cit, hal. 451

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban- Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. xxv.

<sup>4</sup> Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, di terjemahkan oleh M. Sadat Ismail dengan judul, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (Cet, XI; Yogyakarta, Qalam; Juni 2005), h. 95

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan*, Op.Cit, h. 172

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan*, Op.Cit, h. 187

Hal senada juga di dikatakan oleh Samuel Huntington bahwa, argumen yang didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat modern harus bercorak Barat, bahwa peradaban modern adalah peradaban Barat, bagaimanapun juga, sepenuhnya merupakan pengidentifikasian yang salah.<sup>7</sup>

Dalam perspektif ini, kemodernan dengan segala implikasi sosialnya merupakan usaha kritis manusia dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Karena ia merupakan usaha manusia maka dengan sendirinya ia menjadi relatif, sebab pada dasarnya kebenaran insani apapun bentuknya menjadi relatif, dan kebenaran mutlak adalah milik Allah.<sup>8</sup>

Kemunculan gerakan pemikiran "baru" dalam Islam terutama merupakan upaya menjembatani kesenjangan antara idealitas Islam dan realitas umat. Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian; apakah orang-orang Islam dapat mempertahankan dasar-dasar agama Islam dalam modernisasi negeri dan tanah air masing-masing? Mampukah mereka tegakkan prinsip bahwa Islam itu bukanlah agama eskatologis an sich, tetapi juga meliputi persoalan masyarakat dan politik? Ataukah akan melakukan tranformasi.<sup>9</sup>

Kelompok reformis-modernis adalah kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan, publik, dan pribadi. Bahkan mereka menyatakan bahwa pandangan-pandangan dan praktek tradisional harus direformasi berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah (purifikasi Agama), dalam konteks situasi dan kebutuhan kontemporer.<sup>10</sup>

Islam yang diakui pemeluknya sebagai agama terakhir dan penutup dirangkaikan petunjuk Tuhan untuk membimbing kehidupan manusia,

<sup>7</sup> Samuel P. Huntington, *Op.Cit.* h. 98-99

<sup>8</sup> "Dan katakallah (Muhammad), "Kebenaran itu datangya dari Tuhanmu..., Q.s., al-Kahfi/18:29

<sup>9</sup> Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa modernisasi merupakan gerakan pembaharuan pemikiran yang akan selalu terkait dengan perubahan-perubahan masyarakat itu sendiri, sebagaimana kekaguman Vamberly terhadap perubahan yang terjadi di Turki misalnya. Menurut contoh ini, mungkin bisa di pahami bahwa pada dasarnya misi Islam yang utama itu adalah memberi makna pada manusia dalam realitas hidup keseharian. Maka untuk ini, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu memotivasikan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Untuk mewujudkan kerangka idealistik Islam ini jalan yang harus ditempuh adalah melalui gerakan sosial ekonomi dan intelektual untuk mentransformasikan kepada sistem sosial-ekonomi dan politik yang berkeadilan sosial dan demokratis. Dengan demikian pola pemikiran suatu gerakan yang selalu bergumul dengan problematika sosial, akan mampu memberikan jawaban terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

<sup>10</sup> William Shepard, "Fundamentalism; Christian and Islamic, Religion, XVII (1987), 355-378., A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: Rajawali, 1988),

mengklaim dirinya sebagai agama yang paling sempurna. Peradaban Islam dipahami sebagai akumulasi terpadu antara normanitas Islam dan historitas manusia di muka bumi yang selalu berubah-ubah. Maka setiap zaman akan selalu terjadi reinterpretasi dan reaktualisasi atas ajaran Islam yang disesuaikan dengan tingkat pemikiran manusia zaman ini. Nasib agama Islam di zaman modern ini sangat ditentukan sejauh mana kemampuan umat Islam merespon secara tepat tuntutan dan perubahan sejarah yang terjadi di era modern ini.<sup>11</sup>

Konsekuensinya, ajaran dan dogmatisme agama, termasuk Islam, yang semula sakral sedikit demi sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya, yang pandangannya telah mengalami perkembangan mengikuti realitas zaman. Agama pada dataran itu pun akhirnya menjadi profan, sehingga sangat tepat jika munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial, sebuah perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan interaksi sosial).<sup>12</sup>

Kenyataan tentang adanya kesenjangan dan perlunya diakhiri kesenjangan inilah yang mendorong timbulnya modernisme dalam Islam. Pada saat yang sama, ia menampilkan pengertian-pengertian dilema kejahatan di mana gerakan pembaharuan itu dipaksa masuk. Di satu pihak, dalam upaya menuju formulasi prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang modern, para pembaharu itu hanya menjangkau sebagian besar kalangan terpelajar, tidak menyentuh rakyat kebanyakan. Karena itu pengaruh mereka jauh lebih besar dikalangan umat Muslim terpelajar di luar kelompok ahli-ahli agama (ulama).<sup>13</sup> Intinya adalah, Islam mengutuk taqlid secara membabi buta (mengikuti pendapat yang tidak kritis) dalam masalah keyakinan dan pengamalan kewajiban-kewajiban agama secara mekanik.

Islam menjauhkan kita dari keterikatan secara eksklusif kepada segala sesuatu. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan yang ada, dari segi waktunya, lebih dulu sampai kepada kita tidak merupakan bukti pengetahuan atau ketinggian akal fikiran, bahwa para nenek moyang dan keturunannya memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan-kemampuan alami yang sama.<sup>14</sup>

Jadi ia melepaskan diri dari semua rantai yang mengikatnya, membebaskannya dari taqlid buta yang telah memperbudaknya, dan mengembalikan kewenangan kepadanya untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan penilaian dan kebijakannya sendiri, namun demikian, ia wajib

---

<sup>11</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 200

<sup>12</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 4.

<sup>13</sup> H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Moderen dalam Islam*, h. 74

<sup>14</sup> 20 Muhammad 'Abduh, *Rislah Taud*, Terj. B. Michel dan Mustafa Abdul Raziq (Paris: t.t.p, 1925), 107

berkhidmat dihadapan Allah sendiri dan berhenti pada batas-batas yang ditetapkan agama; tetapi dalam batas-batas ini tidak ada penghalang bagi kegiatannya dan juga tidak ada pembatasan terhadap berbagai macam spekulasi yang dapat dikemukakan atas tanggung jawabnya.<sup>15</sup>

Bagaimana, respon pemikiran Islam terhadap menguatnya kapitalisme global aliran neoliberalisme saat ini? Siapapun akan mengalami kesulitan memahami reaksi golongan Islam dalam hal ini. Hal ini justru karena apa yang dimaksud sebagai golongan Islam atau pemikiran Islam, bahkan teologi Islam, tidaklah tunggal. Pemikiran Islam dalam kenyataannya terdiri atas berbagai aliran dan masing-masing aliran telah melahirkan berbagai paradigma, doktrin, serta keyakinan masing-masing dalam merespon fenomena menguatnya sistem kapitalisme neoliberal yang berwatak global tersebut. Oleh karena itu, apa jawaban teoretik, sikap teologis, maupun analisis teoretik umat Islam terhadap proses neokolonialisme dan kembalinya liberalisme ini sangat bergantung dari teologi dan paradigma pemikiran Islam masing-masing. Karena memang sesungguhnya Islam, dari aspek teologi, paradigma, maupun teori sosial adalah agama yang plural, dan karenanya, sangatlah mustahil direduksi dan digolongkan menjadi satu golongan saja. Untuk itu, terlebih dahulu di sini diperlukan suatu peta dasar tentang ideologi pemikiran Islam. Secara kasar, Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa paradigma ideologi tentang bagaimana mereka memahami kemiskinan dan globalisasi.

Modernisme islam juga telah menghancurkan islam indonesia. Karena kehadirannya memecah belah islam yang telah kuat mengakar kuat dan dinamis dalam setiap tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ada segregasi baru berdasarkan ideologi modernisme, yakni islam yang dianggap murni atau asli dan ada islam yang dianggap sesat atau menyimpang. Nilai-nilai dan tradisi islam yang sudah ratusan tahun hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia di goncang dengan ideologi-ideologi baru semenak munculnya Moh Abduh dari Pakstan dengan term baru yakni Modernism.

Jika diuraikan berdasarkan kerangka ideologis, terdapat paling tidak empat kategorisasi umat Islam; tradisional-konservatif, reformis-modernis, radikal-puritan, dan nasionalis-sekuler.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada kemunculan beberapa pemikiran teologi dan filsafat di dunia Islam pada abad klasik, kemunculan gagasan tentang pemikiran ideologis di atas tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial, kepentingan dan kondisi sosial dan budaya bangsa yang sedang berkembang.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid., h. 108

<sup>16</sup> Achmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam* (Surabaya: LPAM, 2004), 57.

<sup>17</sup> Montgomery Watt, *Islamic Theology and Philosophy*.

Hal ini menandakan bahwa meskipun Islam itu satu dari sudut ajaran pokoknya, akan tetapi setelah terlempar dalam konteks sosial-politik tertentu pada tingkat perkembangan sejarah tertentu pula agama bisa memperlihatkan struktur interen yang berbeda-beda.<sup>18</sup> Maka, jika dilihat dari masalah yang diperdebatkan di antara beberapa kelompok di atas, mereka berdebat bukan tentang pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri, akan tetapi bagaimana memmanifestasikan ajaran Islam itu di dalam sistem kehidupan sosial,<sup>19</sup> antara Islam sebagai model of reality dan Islam sebagai models for reality,<sup>20</sup> sehingga menciptakan setidaknya dua bentuk komunitas beragama yaitu antara *folk variant* dan *scholarly variant*,<sup>21</sup> yang dalam konteks keindonesiaan terwujud dalam bentuk komunitas NU dan komunitas Muhammadiyah. Yang pertama sering diklaim sebagai kelompok tradisionalis, dan yang kedua sebagai kelompok modernis.

Oleh karena itu, kategori ini sekaligus menolak kategori lama, bahwa umat Islam Indonesia hanya dibagi menjadi dua kubu, dikotomi Muhammadiyah-NU.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam organisasi Islam seperti NU atau Muhammadiyah, kita memahami realita yang ada, sehingga kita mengalami orang NU yang liberal, orang NU yang fundamentalis, bahkan orang NU yang menganut 'kiri Islam'. Sebaliknya, ada juga orang Muhammadiyah yang tradisionalis maupun yang transformatif. Tidak heran di setiap organisasi Islam seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), HMI, Ansor, atau PII masing-masing memiliki tokoh dari setiap ideologi tersebut, yakni ada tokoh PII fundamentalis, ada tokoh PII modernis dan liberal, ada juga tokoh PII yang transformatif. Pada saat bagaimana mereka masing-masing merespon kemiskinan dan globalisasi, sesungguhnya keempat ideology yang mengambil paradigma tradisionalis, modernis, revivalist, dan transformatif inilah yang berbicara. Berikut secara ringkas, pendirian umum, kasar, dan bersifat preliminary dari masing-masing paradigma tersebut.

<sup>18</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: LP3S, 1996), 11.

<sup>19</sup> Andrew Rippin, *Muslim*, 35.

<sup>20</sup> Yang pertama mengisyaratkan bahwa Islam adalah representasi dari sebuah realitas, sementara yang kedua mengisyaratkan bahwa Islam merupakan konsep bagi realitas, seperti aktivitas manusia. Dalam pemahaman yang kedua ini Agama mencakup teori-teori, dogma atau doktrin bagi sebuah realitas. Bassam Tibi, *Islam and the Cultural*, 8.

<sup>21</sup> Ernest Gellner, *Muslim Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 5.

<sup>22</sup> Lihat Madjid, Nurcholish (1987), *Islam Kemodern-an dan Keindonesiaan* Bandung: Mizan

### Paradigma Nahdlatul Ulama'

KH. Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama (NU 1926) yang pengaruhnya sangat besar dengan banyak didukung kiai-kiai (Ulama") dengan pondok pesantrennya, disamping memang ada kiai dan pondok pesantrennya yang tidak sefaham dengan gerakan KH. Hasyim Asy'ari. Walaupun dengan NU Tajdid bersikap terbuka terhadap modernisasi namun tetap merawat baik tradisi. Karena ulama NU berpegang kepada Fiqh dengan jargonnya yang terkenal yaitu, Memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih relevan.<sup>23</sup>

Disamping itu, K.H. Mahfudz Shiddiq merupakan simbol modernitas di kalangan NU. Di masa mudanya, meski sudah dikenal sebagai kiai, ia tak canggung tampil di depan umum tanpa kopiah. Bahkan, konon, dialah tokoh NU yang pertama kali berani tampil mengenakan dasi. Kala itu, mengenakan dasi masih diharamkan, karena termasuk tasyabuh (menyerupai) kebiasaan kaum penjajah Belanda. Toh, ia mampu berargumentasi di hadapan para kiai. Dan di masa tuanya, ia gemar berolahraga dengan sepeda statis dan menikmati musik klasik.<sup>24</sup> Walaupun demikian, beliaulah bukan sumber dari modernisasi di tubuh internal NU.

### Nahdlatul Ulama'; Pemikiran dan Internal Organisasi

NU yang selama ini dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan gairah progresivitas berpikir, dibandingkan dengan organisasi modern yang malah tampak stagnan dan resisten. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam mencermati perubahan sosial. Pemahaman agama bergerak tidak lagi secara tekstualis, tetapi kontekstual. Tentunya ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Kemajuan peradaban selalu lahir dalam suasana kebebasan pikir. Mengutip Arnold Toynbee, peradaban digerakkan creative minority, kelompok kecil yang terus mengupayakan gerak pemikiran yang kreatif.

Mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. Dalam

<sup>23</sup> Mutamakkin billa. *Masuknya modernisme barat dan islam di indonesia; fase-fase kesadaran sosial-keagamaan*. PDF. Artikel

<sup>24</sup> <http://artikerkondang.blogspot.com/2012/09/perkembangan-dan-dinamika-nu-nahdlatul.html>. dalam artikel NU dan Pesantren Tebuireng

istilah Moch Abid al-Jabiri disebut al-tajdid min al-dakhil atau pembaruan internal.

Sebetulnya, jika pembaruan pemikiran selalu berlangsung dalam rangka tradisi, usaha modernisasi akan berlangsung dalam perangkat tradisi yang dinamis-dialogis. Sebab, tidak semua tradisi bertentangan dengan kemajuan. Kita bisa belajar dari pemikiran Weber mengenai etika Protestan yang lalu diikuti Robert Bellah dan Clifford Geertz. Dari kajian itu terbukti, semua sistem etika mengandung unsur yang jika dikembangkan dapat menjadi wahana guna menopang usaha modernisasi. Jadi, kita perlu menghindari dari kasus Turki, saat Mustafa Kemal Pasha melakukan pembaruan secara radikal dengan mencampakkan tradisi keislaman yang sebenarnya sudah berurat berakar dalam masyarakat Muslim Turki.<sup>25</sup>

Di Indonesia, terutama di dalam masyarakat Jawa, hanya dikenal adanya Islam NU dan Islam Muhammadiyah. NU sering dilihat sebagai kelompok tradisional, sementara Muhammadiyah, sebagai kelompok modernis.<sup>26</sup> Namun dikotomi ini kemudian dianggap tidak layak lagi, karena dalam perkembangan selanjutnya, NU bersifat lebih terbuka terhadap modernitas.<sup>27</sup> Agenda sentral gerakan Muhammadiyah pada dasarnya adalah 'berperang' melawan bid'ah dan khurafat, serta 'berlomba dalam kebaikan'. Oleh sebab itu, mereka juga dikenal sebagai gerakan purifikasi. Gelombang kedua gerakan pembaharuan muncul pada awal Orde Baru. Kaum modernis (atau kaum pembaharu) ini memfokuskan peperangan melawan siapa saja yang merintang modernisasi dan pembangunan, melalui agenda sekularisasi.<sup>28</sup> Asumsi dasar mereka adalah bahwa keterbelakangan umat karena umat Islam melakukan sakralisasi terhadap semua aspek kehidupan. Penganut paradigma modernisasi ada di mana-mana, tidak hanya di kalangan Muhammadiyah, di kalangan NU pun ada.

Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arbiyah Lubis, ditemukan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam kelompok tradisional modernis. Di mana Muhammadiyah tampil sebagai modernis hanya dalam

<sup>25</sup> Said Aqil Siradj, NU, Tradisi dan Kebebasan Pikir

<sup>26</sup> Ronald Alan Lukens Bull, A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction (A Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy in Arizona State University, 1997), 125

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, Suplemen Republika, Kamis, 14 Maret 2002, hal. 7.

<sup>28</sup> Menurut M. Dawam Rahardjo, Dr. Nurcholish Madjid telah membantu untuk memungkinkan secara ideologis bagi intelektual Muslim untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lihat Rahardjo, Islam dan Modernisasi: Catatan atas paham Sekularisasi Nurcholish Madjid, pengantar untuk buku Dr. Nurcholish Madjid, halaman 30-31.

dunia pendidikan, dan dalam memahami teks al Qur'an dan Hadith sebagai sumber ijtihad, Muhammadiyah berada dalam kelompok tradisionalis.<sup>29</sup>

Sementara dalam penelitian lain, Muhammad Azhar juga mengatakan bahwa dalam beberapa hal, NU yang dianggap tradisional, ternyata lebih modern keimbang Muhammadiyah. Sebagai contoh, proses penerimaan asas Pancasila, pendirian BPR Nusumma, ternyata NU terkesan mendahului Muhammadiyah.<sup>30</sup> Nurcholish Madjid, tokoh intelektual Muslim Indonesia, juga mengatakan bahwa pola pemikiran Neo-modernisme Islam akan muncul dari kalangan NU yang kaya khazanah klasik, ketimbang Muhammadiyah, dan kini hal itu terbukti dengan munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang tokohnya banyak didominasi oleh kalangan pemuda NU.

Pada umumnya, di kalangan internal NU belum begitu menerima pemikiran yang diusung para kalangan muda ini. Padahal, apa yang mereka kembangkan adalah hasil dari gagasan dan pemikiran mending Gus Dur yang juga mantan ketua umum PB NU. Menurut Greg Barton, para pemikir yang menjadi pendukung Islam liberal di Indonesia antara lain Nurchalis Majid dengan gagasan neomodernisme dan sekularisasi Islam (meski, Nurcholis tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal untuk mengembangkan gagasan-gagasan pemikiran Islamnya. Tapi ia tidak menentang ide-ide Islam liberal), Abdurrahman Wahid dengan paham pribumisasi Islam, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib.<sup>31</sup>

Menurut Gus Dur, guna mempertahankan tawaran pribumisasi Islam, setidaknya ada dua alasan pokok. Pertama, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam. Baik di negeri asalnya maupun negeri lain termasuk Indonesia. Kedua, proses pribumisasi Islam berkaitan erat antara fikih dengan adat. Menurutnya, adat tidak mengubah nash, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan implementasinya agar lebih fleksibel.

Meski pemikiran dan wacana yang diusung oleh kalangan liberal NU merupakan hasil ramuan dan pengembangan pemikiran-pemikiran Gus Dur, itu tidak menjadikannya langsung diterima oleh kalangan NU. Bahkan, mereka mendapat penolakan. Lebih-lebih kalangan kiai dan sesepuh NU. Dari PB NU yang notabene organisasi yang menaungi Ulil juga memberikan tanggapan terhadap pemikiran-pemikiran yang diusung JIL, adalah K.H. Salahuddin Wahid yang menyatakan bahwa JIL –yang kebanyakan dipelopori oleh anak-anak muda NU– jauh liberal dari Nurcholish Madjid.

Setidaknya ada dua alasan mendasar mereka kurang diterima atau tidak mendapatkan tempat di kalangan jamaah NU. Pertama, ide-ide yang mereka

<sup>29</sup> Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah*, 185.

<sup>30</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Peradaban* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 89.

<sup>31</sup> Greg Barton, 1999: 27

usung telah dianggap keluar dalil doktrin dan paham akidah *alussunnah wal jamaah* yang selama ini menjadi landasan NU secara jamiyah dan jamaahnya dalam kehidupan beragama.

Paham-paham seperti pluralism, inklusivisme dan humanisme dengan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dinilai telah melenceng dari pakem yang dipegangi NU selama ini. Pluralisme telah menyimpang karena dianggap menyamakan semua agama di muka bumi ini. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah perbedaan perspektif dalam mengartikan pluralism.

Kedua, pemikiran liberal NU yang juga merupakan anak-anak didik Gus Dur terkesan elitis dan asing di kalangan NU yang notabene mayoritas dari pedesaan. Isu-isu dan wacana demokrasi, penegakan HAM, pluralisme, inklusifisme dan humanism merupakan hal yang masih agak atau bahkan sangat asing di kalangan NU. Khususnya jamaah kalangan *grass root*.

Para tokoh dan kiai sangat khawatir NU akan keluar dari frame doktrin *ahlussunnah waljamaah* yang telah ditanamkan para founding fathers NU yang sudah turun-temurun menjadi pegangan dalam perjuangan dakwah Islamiyah.

Sementara pemikiran Gus Dur yang malah menjadi sumber inspirasi kalangan liberal NU seolah biasa dan tetap bisa diterima. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Antara lain, pertama, karisma Gus Dur. Hal ini dikarenakan beliau merupakan keturunan "darah biru" dari hadharatussyaikh K.H. Hasyim Asy'arie. Dengan adanya karisma ini, meski ide-ide dan pemikiran beliau dianggap liberal dan sering keluar dari frame dan mind set kalangan tokoh dan para kiai NU, sedikit tidak menggoyahkan kekuatan beliau di hati para jamaah NU termasuk ide dan gagasannya.

Kedua, faktor kedekatan Gus Dur dengan kalangan bawah. Dengan sikap yang apa adanya, bergaul dengan siapa saja, tidak elitis membuatnya menjadi milik setiap golongan, terutama kalangan akar rumput. Hal inilah yang menjadikan pemikiran liberal beliau tidak terkesan elitis.<sup>32</sup>

Saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memimpin NU, aneka pemikiran yang dilontarkan cukup brilian dan melampaui batas normatif ke-NU-an. Bisa ke kanan, ke kiri, atau tetap di tengah. Hanya saja, saat itu, Gus Dur amat jeli dan lincah mengemas dan meramu pemikiran besarnya. Riak-riak kecil tetap ada, tetapi tak sampai menjadi mainstream. Kapasitas pemikiran, pengalaman, dan kedewasaan intelektual Gus Dur membuat lontaran-lontaran pemikirannya amat produktif pada generasi muda NU, cendekiawan, dan tokoh-tokoh agama lain.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Mustofa, Imam, "Gus Dur dan Liberal NU", *Radar Lampung*. Rabu, 4 Januari 2012

<sup>33</sup> Alfaruqi, Jabir, Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah. NU, Fundamentalisme, dan Liberalisme. harian *Kompas*, 28 Juli 2006

### Nahdlatul Ulama' dan Organisasi Pemuda NU

Selain itu, Basis organisasi kemahasiswaannya selain di jajaran organisasi NU, juga di PMII. Pernyataan menarik dari seorang antropolog asal Belanda, Martin van Bruinessen terkait aktivitas mereka adalah sebagai berikut: "...dalam diskusi-diskusi informal dikalangan santri tua dan mahasiswa berlatar belakang NU, perdebatan dan pencarian wacana baru benar-benar hidup. Banyak diantara orang muda ini sudah berpengalaman dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat, dan memiliki kepedulian kepada masalah-masalah keadilan social dan ekonomi. Organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke NU, PMII, selama beberapa tahun ini telah menjadi salah satu organisasi mahasiswa paling dinamis dalam hal perdebatan intelektual. Kontras dengan mahasiswa Islam Modernis, anggota PMII biasanya mempunyai penguasaan lebih baik terhadap ilmu tradisional, tetapi bacaan mereka jauh lebih luas dari kurikulum tradisional semata. Sementara para mahasiswa modernis masih banyak dipengaruhi para pengarang Maududi dan Sayyid Qutb. Mahasiswa PMII memperlihatkan minat yang besar kepada pengarang radikal, seperti Hassan Hanafi, filsuf mesir itu. Diskusi-diskusi dilingkungan mereka akhir-akhir ini menjurus ke pokok persoalan keterbelakangan Dunia Ketiga, keadilan ekonomi, dan hak asasi termasuk pertanyaan yang sulit tentang hak perempuan dalam Islam. Perdebatan di lingkungan mahasiswa ini akan semakin memberikan tekanan kepada ulama di Syuriyah untuk menyoroti masalah-masalah yang sama dan memikirkan kembali banyak pangangan fiqih yang sudah mapan."<sup>34</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan suatu pengamatan yang jeli dan pengakuan akan adanya gerak dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, dan peran yang dimainkan kaum muda NU. Secara perorangan memang tak seorang pun diantara mereka yang tercatat berhasil menawarkan gagasan dan bangunan pemikir baru yang signifikan, sebagaimana tokoh-tokoh pemikir generasi 1970-an dan 1980-an. Mereka dalam konteks ini masih menjadi konsumen pemikiran yang lahap. Apa saja asal kritis, radikal, dan "nakal" dikonsumsi dan ditularkan ke teman-temannya. Akan tetapi, secara kolektif gerakan mereka harus diakui mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat luas, baik kalangan terpelajar maupun non-pelajar, kalangan muda maupun tua, terutama lewat produksi penerbitan buku-bukunya dan selebaran-selebaran yang visioner, provokatif, dan mencerdaskan.

Sejauh ini, kita memang belum menemukan basis epistemologi dari Post-Tradisionalisme Islam. Istilah ini muncul untuk menamai suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri khusus, yang secara kategorial tidak bisa disebut Modernis, Neo-Modernis, dan tidak bisa pula dikatakan tradisional atau Neo-Tradionalis, sebagai mana yang di ekspresikan kalangan kaum muda NU tadi.

<sup>34</sup> Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa* hlm 233-234

Istilah ini memang masih debatable, belum memiliki gambaran epistemologis yang jelas. Akan tetapi secara simplistik, gerakan Post-Tradisionalisme dapat dipahami sebagai suatu gerakan "lompatan tradisi". Gerakan ini, sebagai mana Neo-Tradisionalisme, berangkat dari suatu tradisi yang secara terus-menerus berusaha memperbaharui tradisi tersebut dengan cara mendialogkan dengan modernitas. Karena intensifnya berdialog dengan kenyataan modernitas, maka terjadilah loncatan tradisi dalam kerangka pembentukan tradisi baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Di satu sisi memang terdapat kontinuitas, tetapi dalam banyak bidang terdapat diskontinuitas dari bangunan tradisi lamanya.

Umumnya, bersamaan dengan pengembangan pemikiran Post-Tradisionalisme terjadi juga nuansa "liberasi pemikiran". Gerakan Post-Tradisionalisme yang terjadi dalam kultur NU, akan memungkinkan NU untuk melakukan sebuah loncatan tradisi, tidak hanya berfikir, tetapi juga dalam bertindak dan bersikap dalam era global belakangan ini.

Secara umum, gerakan pemikiran yang dimotori anak muda NU bersifat plural, terbuka, apresiatif terhadap hal-hal baru dan tetap merakyat serta sosial. Kecenderungan revolusioner radikalnya tetap tak berkurang, namun lebih dijabarkan dengan sikap toleransi tinggi, penghormatan pada hak asasi, dan konsistensi pada penguatan masyarakat sipil.

Menariknya, pembaruan pemikiran yang dilakukan anak muda nahdhiyin bukan karena tuntutan akademis, tetapi semata karena keterpanggilan realitas sosial yang sehari-hari mereka gumuli bersama masyarakat bawah. Karena itu, pembebasan yang dilakukan tidak hanya pada level sosial dan praktis, tetapi juga pembebasan dalam kaitan doktrin keagamaan yang tidak lagi relevan dan dari tradisi nilai budaya yang dianggap sudah usang. Gagasan liberasi ini juga ditempuh dengan liberalisasi, yakni pembebasan cara berpikir.

### **Nahdlatul Ulama' dan Organisasi Liberal**

Di samping agenda-agenda global, terdapat tiga agenda ke-Islaman yang diproduksi oleh kalangan muda NU.<sup>35</sup>

#### a. Jaringan Islam Liberal

Aktivisnya Ulil Abshar Abdalla, Lutfi Assyaukani, Ahmad Sahal, Nong Mahmada, Abdul Muqsit Ghozaly dan lain-lainnya. Kemunculannya dilatarbelakangi oleh munculnya gerakan Islam konservatif dan fundamentalis

<sup>35</sup> <http://teknologi.ee.itb.ac.id/content/membuka-kedok-tokoh-tokoh-liberal-dalam-tubuh-nu-karya-kh-muh-najih-maimoen>. diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Dalam pembahasan singkat dalam buku *Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal dalam Tubuh NU* karya KH. Muh. Najih Maimoen

yang memanfaatkan liberalisasi politik masa reformasi. Mereka dengan getol menyuarakan pentingnya menyegarkan pemikiran Islam dengan pendekatan lebih liberal.

Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa tokoh yang terlibat dan membela aliran-aliran sesat yang maju ke pemilihan Ketua Umum PBNU yaitu:

1. Sholahuddin Wahid yang pernah membela Ahmadiyah, dengan mengatakan, "Negara tidak boleh merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Negara itu rujukannya UUD 1945 dan undang-undang."
2. Ulil Abshar Abdalla, Mantan petinggi Jaringan Islam Liberal (JIL).
3. Said Aqil Siradj (Syi'ah) yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW dan merendahkan para Shahabatnya, menyamakan akidah Islam dengan Kristen.
4. Masdar Farid Mas'udi (JIL) yang pernah merubah waktu pelaksanaan haji.
5. Ahmad Bagja yang pernah mendukung aliran sesat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan mengirim surat protes kepada MUI tentang fatwa sesat aliran tersebut.

"Gagasan liberal di NU dimulai dari gusdur, saya melanjutkan saja" Kalimat itu ditulis Ulil Abshar Abdalla via Twitter pada Jum'at, 4 Mei 2012. Seperti kita tahu, Ulil adalah aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) yang saat ini menjadi musuh mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama umat Islam yang ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja). Organisasi berfaham liberal tersebut kini telah merusak akidah dan syariat umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika saja Gus Dur tidak terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Mukhtar NU di Situbondo pada 1984, mungkin paham-paham sekuler dan liberal tidak akan berkembang di NU. Sebab, saat itu hubungan NU dengan pemerintah sedang mesra-mesranya. Namun dengan kehadiran Gus Dur, hubungan tersebut menjadi retak. Ia menentang pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digagas oleh Prof. DR. Ing. Habibie, yang merupakan 'anak emas' Soeharto. Tak heran jika kemudian ia menantang dan membuat organisasi tandingan, yakni Forum Demokrasi (Fordem).<sup>36</sup>

Jika liberalisme dimaknai sebagai kebebasan dalam berpendapat (*ijtihad*), beragama dan berkeyakinan, maka ini bukan sesuatu yang baru dalam NU. Tradisi *ijtihad* dalam bahtsul masail sudah berurat akar dalam NU. Apalagi, hadirnya (alm) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, telah menjadi dinamika historis NU. Hidup Gus Dur telah bersenyawa dengan kontroversi, baik pemikiran maupun sikap-sikap politiknya. Dalam hal pemikiran, Gus Dur telah menyuarakan pribumisasi Islam, dengan menyatakan Assalamu'alaikum bisa diganti selamat pagi/siang/sore.

<sup>36</sup> <http://yesimmoslem.blogspot.com/2012/05/melacak-jejak-pemikiran-gus-dur-1.html>. Diases pada 13 Desember 2012.

Gus Dur pun dihakimi banyak kiai perihal pandangan-pandangan keagamaannya. Sebagaimana Gus Dur, Ulil Absar Abdallah yang telah menjadi maskot JIL juga dihujat pandangan-pandangannya.<sup>37</sup>

b. Islam Emansipatoris

Lahir dalam upaya keluar dari dilema yang dihadirkan paradigma Islam liberal dan Islam fundamentalis. Misi dan ajarannya tidak jauh berbeda dari Islam liberal, bahkan bisa dikatakan penjelmaan baru dari Islam liberal. Hanya saja titik tolak Islam emansipatoris terfokus pada problem kemanusiaan. Teks suci baik yang primer, sekunder maupun tersier tidak dijadikan titik sentral perdebatan, sebagaimana yang terjadi pada skripturalis, ideologis, modernis, fundamentalis dan liberalis. Melainkan subordinat terhadap pesan moral, etika ataupun spiritual. Dengan landasan ini, Islam emansipatoris ingin mengundang perhatian pada persoalan-persoalan riil keumatan-kerakyatan yang secara akut menghimpit lapisan besar masyarakat yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik dan budaya. Maka agendanya adanya pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan yang merata dan murah, jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak, pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih yang memihak rakyat.

Pengusung gagasan Islam emansipatoris adalah Masdar Farid Mas'udi, direktor PEM, Zuhairi Misrawi Lc, Muhtadin AR, DR. Rumadi, DR. Noer Arifah, Agus Muhammad dan Ali Shobirin. Dalam melaksanakan program-programnya, mereka menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, di antaranya: PGNU, RMI dan pesantren, beberapa mitra funding agency PEM antara lain: The Ford Foundation, Partnership dan The Asia Foundation. Beberapa organisasi yang bekerjasama dengan P3M antara lain; ICW, PSPK/FITRA, Lakpesdam NU, YLBHI, BISMII, Debt Wacth, INFID, IIIT dan PBNU.

*Pertama*, sakralisasi teks. Teks tidak lagi dipahami sebagai dialektika antara wahyu dan budaya, melainkan sebagai wahyu yang terpisah dengan budaya.

*Kedua*, kerancuan metodologis. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin keagamaan terkesan fatalistik dan mengabaikan aspek metodologis. Beragama diartikan sebagai kepasrahan yang bersifat pasif dan menerimanya tanpa reserve. Beragama hanya dilihat dari aspek ritualitasnya belaka.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Gazali, Hatim" *Liberalisme, JIL dan NU Waria*"

<http://gazali.wordpress.com/2010/06/05/liberalisme-jil-dan-nu-waria/>. Dises pada 13 Desember 2012.

<sup>38</sup> demikian Muhammad Arkoun mengamati pemikiran keagamaan kontemporer. Interdependensi yang begitu kuat terhadap masa lalu mempunyai dampak yang harus dibayar mahal oleh masyarakat beragama,

Karena itu, saatnya dihadirkan sebuah bentuk keberagamaan yang berlandaskan kesadaran terhadap teks dan konteks, sekaligus mampu membawa misi pembebasan dan pencerahan bagi masyarakat. Agama sejatinya tidak dilihat sebagai dokumen teologis belaka, akan tetapi sebagai jalan menuju terciptanya perubahan pada tataran realitas.

### c. Islam Transformatif

Pendekatan Islam liberal dan emansipatoris tampaknya belum memuaskan. Mereka menganggapnya masih bersifat kultural. Gagasannya hanya sebatas pengembangan demokrasi, pluralisme, toleransi, civil society, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Sedangkan persoalan yang lebih struktural, seperti dampak globalisasi dan pembangunan, hegemoni kapitalisme, neo-kolonialisme, diabaikan dalam wacana mereka. Penggagas utama Islam transformatif adalah Moeslim Abdurrahman. Intelektual Muslim berlatar belakang keluarga Muhammadiyah ini, dalam keseharian justru banyak bergelut dengan seabreg persoalan umat 'tradisional', di pesantren, dan pedesaan. Tokoh lain yang tidak bisa diabaikan adalah Mansour Faqih. Aktifis yang dibesarkan oleh P3M dan LP3ES ini sangat banyak memberikan panduan bagi aktifis LSM dalam mendesain kerja-kerja sosial. Gagasan ini justru lebih banyak dikerjakan oleh LSM-LSM NU.

LSM ini sering mendapatkan cap "NU Progresif". LSM ini dimotori para mantan aktivis organisasi atau pergerakan mahasiswa (PMII) dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah (UNSI Wonosobo dan STAINU Kebumen) serta Yogyakarta (IAIN Sunan Kalijaga). INDIPT sesuai dengan namanya, bergerak dalam bidang penguatan. Tiga bidang garapannya antara lain:

- a) Penguatan masyarakat melalui peningkatan pluralisme dan perdamaian.
- b) Penguatan masyarakat melalui peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- c) Penguatan masyarakat melalui peningkatan hak dan partisipasi politik perempuan.

Kesetaraan gender. Kritik pedas terhadap masalah inipun tercermin, misalnya dalam buku *Kembang Setaman Perkawinan*, karya Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang dipimpin oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Buku ini menganalisis secara tajam kitab *Uqud al-Lujain* karya Imam Nawawi Banten, sehingga kitab ini dipandang "harus dilakukan perombakan dan penyesuaian agar tidak ketinggalan zaman". Pikiran-pikiran kritis masalah gender dalam dunia pesantren dan ajaran Islam klasik ini sekarang banyak dilakukan oleh kyai Husein Muhammad, pengasuh pesantren Darut-Tauhid, Arjawinangun Cirebon, sekaligus Ketua Kebijakan Fahmina Institute.

Lembaga Mujahid Dakwah (LMD), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), lingkaran-lingkaran keagamaan di kampus umum, masjid-masjid "independen"

dan harokah Islam yang bersifat global serta program-program mentoring Islam merupakan saluran-saluran utama bagi transmisi ideologi dakwah. Di sisi lain HMI, PMII, NGO-NGO/LSM, dan lingkaran-lingkaran mahasiswa dan intelektual di IAIN dan NU menjadi katalis utama bagi proses transmisi ide-ide pembaruan/liberal. Yudi Latif pun kemudian menyebutkan nama-nama seperti Hatta Radjasa, Hidayat Nurwahid, Adian Husaini dan Anis Matta sebagai contoh inteligensia faksi pertama; dan Azyumardi Azra, Masdar Farid Mas'udi, Komarudin Hidayat, Ulil Absar Abdalla, Luthfi Assyaukanie sebagai contoh inteligensia faksi kedua.<sup>39</sup>

### **Nahdlatul Ulama': Agama dan Tata Negara**

Dalam diskusi tentang relasi agama dan negara perspektif religious power, yang telah dilakukan oleh para pemikir besar terutama setelah abad pertengahan, secara garis besar terdapat dua model paradigma. Yaitu konsep organik dan sekuler. Donald Eugene Smith dalam bukunya "Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis"<sup>40</sup> menegaskan bahwa dalam paradigma organik, agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Sedangkan dalam paradigma sekuler perlu pemisahan antara agama dan negara dengan tujuan untuk melindungi kesempurnaan agama.

Pertanyaan yang perlu dimajukan adalah "*bagaimana pemikiran kiai NU tentang relasi agama dan politik (negara)*". Jawaban atas pertanyaan ini perlu berorientasi pada paham keagamaan versi sunni seperti dikemukakan di atas sambil merelasikan dengan trikotomi mengenai relasi agama dan negara di atas. Bertitik tolak dari sini, akan tampak jelas bagaimana pemikiran politik kiai NU yang tergambar dari perilaku politik NU sendiri sepanjang sejarah perjalanannya.

Malah menurut al-Mawardy, seorang tokoh yang pandangannya menjadi rujukan sebagian besar pandangan NU mengenai politik, bahwa di bidang yang berkaitan dengan masalah kenegaraan pun sikap luas dan luwes ilmu fikih lebih

<sup>39</sup> Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005, hlm. 661-663. Analisa Yudi Latif ini tentu masih perlu diperdebatkan. Karena tidak serta merta intelektual di IAIN dan NU pasti liberal. Tak sedikit aktivis dakwah dan kaum intelektual dari kampus Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) seperti UIN, IAIN dan STAIN juga NU yang justru menolak dan melakukan gugatan atas berbagai pemikiran liberal, termasuk dengan melakukan berbagai seminar, workshop dan lain-lain. Bahkan sudah banyak dari mereka yang berhasil meluruskan berbagai ide liberal melalui karya tulis seperti buku dan artikel di berbagai media massa.

<sup>40</sup> Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 26.

banyak ditemukan. Pada awal pendirian NU, ijtihad-ijtihad politik NU tampak diorientasikan pada format pencarian paradigma hubungan agama dan negara. Pada Mukhtamar NU di Banjarmasin pada tahun 1938, status Indonesia diputuskan sebagai Dar al-Islam (negara Islam), karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika waktu itu bumi Indonesia masih dalam penjajahan Belanda (bangsa asing), maka hal itu sifatnya hanya sementara. Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh muktamirin adalah penjelasan kitab *Bughyah al-Mustasyidin* bab *Hudna wa al-Imamah*.<sup>41</sup> Dengan merujuk kitab karangan ulama Shafi'iyah itu, NU membedakan jenis negara menjadi tiga, yaitu *dar al-islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai) dan *dar al-harb* (negara perang).

Salah satu pandangan organisasi para kyai ini tercermin dari dalil seperti dikutip berikut ini: Janganlah kalian tentang (lawan) pemegang kekuasaan dalam masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab mereka dan janganlah kalian protes mereka kecuali kalian lihat dari mereka kemungkaran yang nyata kalian ketahui dari kaidah-kaidah Islam. Jika kalian lihat itu, kalian harus menentang mereka dan tegakkan kebenaran di manapun kalian berada. Adapun memisahkan diri dari mereka dan memerangi mereka haram menurut kesepakatan umat walaupun mereka fasik.<sup>42</sup>

Dengan demikian, menurut pandangan NU, negara dan pemerintah wajib ditaati sepanjang kelangsungan syariah dijamin dan kekufuran (pelanggaran terhadap hukum agama) tidak terjadi. Hal ini berarti, sebagaimana dinyatakan oleh Abdurrahman Wahid,<sup>43</sup>

Dalam hal ini Abdurrahman Wahid menyatakan: Dalam Konstituante di tahun 1958-1959, NU memperjuangkan berlakunya syari'ah dalam undang-undang negara (berarti memuat negara Islam), di tahun 1959 menerima dekret Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 1945, dan di tahun 1983-1984 menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Penerimaan lain-lainnya adalah dalam konteks Republik Indonesia sebagai *dar al-sulh*, sedangkan perjuangan di konstituante sebagai komitmen kepada idealisme *dar al-Islam*, gagasan mengaplikasikan syari'ah melalui legislasi undang-undang negara. Dengan ungkapan lain, sikap mencoba mendirikan *dar al-Islam* sudah pernah dilakukan karena demikianlah perintah agama yang harus dilakukan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 95.

<sup>42</sup> Syamsuddin Haris, "Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU", Dalam *Pesantren*, No. 2/Vol.VIII/1991, h. 30.

<sup>43</sup> Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1978), h. 34.

<sup>44</sup> Syamsuddin Haris, *Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU*, h. 33-34.

Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa relasi Islam dan negara (politik) telah terumuskan di dalam pemikiran kitab kuning dan pandangan-pandangan para pendiri Nahdlatul Ulama sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu di antara Panitia Sembilan yang merumuskan Pancasila adalah KH. Wahid Hasyim, salah seorang tokoh NU. Juga, ditetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara telah diterima secara tulus oleh para kyai. Bahkan keputusan itu sudah menjadi ketetapan dalam Mukhtamar NU ke-11 di Banjarmasin pada 1936.<sup>45</sup> Lebih lanjut, wacana ini menjadi tuntas dengan penegasan KH. Ahmad Shiddiq dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (1983) di Situbondo bahwa hubungan antara Islam dan negara (politik) bersifat simbiosis mutualisme. Hubungan antara keduanya diibaratkan "dua sisi mata uang yang berbeda, namun hakikatnya saling berhubungan dan membutuhkan; jika satu sisi dari kedua sisinya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai sebuah koin mata uang".

Dengan kaitannya masalah ketata-nagaraan, maka Pancasila menjadi bagian didalamnya. Penerimaan NU atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh NU secara matang dan mendalam. NU adalah organisasi kemasyarakatan yang pertama menuntaskan penerimaannya atas Pancasila.<sup>46</sup> Kendati demikian hal itu bukanlah alasan untuk menuduh bahwa penerimaan itu karena ia bersikap akomodatif, dan juga tidak benar bahwa kembalinya NU menjadi organisasi keagamaan atau meninggalkan politik praktis sebagai sikap yang emosional.<sup>47</sup> NU bukan hanya pertama menerima tetapi juga yang paling mudah menerima Pancasila. Muhammadiyah menerima Pancasila setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>48</sup>

Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.<sup>49</sup>

Pancasila dipandang sebagai suatu produk masyarakat yang diperlukan untuk kelestarian itu sendiri. Ia tidak lagi dicurigai sebagai saingan agama seperti sikap NU ketika asyik menggumuli politik praktis. Ketika NU mulai

<sup>45</sup> M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, h. 94.

<sup>46</sup> Karim, *Dinamika*, hlm. 90.

<sup>47</sup> Lihat, *Ibid.*, hlm. 90-91.

<sup>48</sup> Lihat, Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, (Jakarta Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 33-69.

<sup>49</sup> Mukhtamar Situbondo, hlm. 101.

mengambil sikap untuk kembali menjadi organisasi keagamaan maka ia dapat menilai secara lebih realistis. Pancasila dinilai sebagai falsafah bangsa sedangkan agama adalah wahyu. "*Pada dasarnya, sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, kecuali jika diisi dengan tafsiran atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam*".<sup>50</sup> Sering dikatakan bahwa Islam tidak dapat memisahkan agama dan politik. Itu memang benar dan NU tidak memisahkan agama dan politik atau agama dengan masyarakat, tetapi ia membedakan mana bidang yang berguna ditanggapi dan mana yang tidak berguna; dan mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak demi tujuan keagamaan. Tepat seperti yang dikatakan oleh al-Ghazali: Mencari kebenaran meminta sang pencariannya untuk membedakan antara hal-hal dan tujuan yang penting dan perlu yang ada dalam masyarakat dengan hal-hal dan tujuan-tujuan yang tidak penting dan tidak perlu.<sup>51</sup> Dalam deklarasi termaktub penerimaan atas Pancasila diputuskan sebagai dasar dan jalan bagi NU untuk menjalankan syariat (hukum agama) Islam. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'atnya.

Peluang untuk itu sudah terbuka secara potential dalam Negara Pancasila, karena dalam negara ini NU menilai negara Indonesia terjamin wawasan keagamaannya! Ketuhanan Yang Maha Esa sekarang menjadi suatu fithrah bangsa Indonesia untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga tercapai tingkat pemahaman Keesaan yang sesuai dengan penilaian Islam dan pada gilirannya tercapai pula masyarakat keagamaan (Islam) yang sejahtera!

Pada titik sebagai sumber inspiratif dan sekaligus batasan normatif dari ajaran inilah sebuah konsep menyeluruh tentang Islam sebagai Ad-Din (Agama, huruf besar untuk menunjukkan klaim kebenaran tunggal bagi dirinya) Islam sebagai keimanan, hukum agama (Syari'at), dan pola pengembangan aspek-aspek kehidupan, dalam totalitasnya berfungsi sebagai jalan hidup yang akan membawakan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam totalitas jalan hidup itu dirumuskan arah, orientasi, wawasan dan lingkup kehidupan perorangan dan bermasyarakat manusia, dengan pola hubungan antara kaum muslimin dan yang bukan muslimin diatur didalamnya. Dalam keadaan demikian, tidak lagi akan ada hal-hal yang tidak berwawasan keagamaan, antara wilayah agama dan wilayah-wilayah lain sudah tidak ada perbedaan lagi.<sup>52</sup>

Wawasan keagamaan yang diutamakan oleh NU diperkuat pula oleh Pembukaan UUD 1945 yang memuat anak kalimat "Atas berkat rakhmat

<sup>50</sup> Karim, *Dinamika*, hlm. 213.

<sup>51</sup> Othman, op. cit., hlm. 252.

<sup>52</sup> Abdurrahman Wahid, *Persepsi Gerakan Islam Tentang Kebudayaan: Sebuah Tinjauan Dini Tentang Perkembangannya di Indonesia*, dalam, Alfian, ed., op. cit., hlm. 62-63

Allah".<sup>53</sup> Menurut Sidjabat ketika membahas konsep Ketuhanan dalam sila Pancasila dalam rangka tuntutan kalangan nasional muslim agar negara berdasarkan Islam, mengatakan bahwa anak kalimat "Atas berkat rakhmat Allah" digunakan untuk memperkuat tuntutan itu.<sup>54</sup> Bagi kalangan muslim nama itu khas nama Islam sebab tidak ada Allah lain kecuali yang dikenal oleh kaum muslimin melalui Quran.<sup>55</sup> Kendatipun penghayatan keagamaan di kalangan Islam di Indonesia dapat saja diliputi oleh pengaruh sinkretisme dan mistisme, mempercayai Allah sebagai yang Esa dan maha kuasa tetap merupakan sesuatu yang mutlak.<sup>56</sup> Memang, Pancasila itu sendiri bersifat filosofi, tetapi bila kita perhatikan rumusan sila pertama Pancasila dan anak kalimat "Atas berkat rakhmat Allah" di dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara Indonesia benar-benar mengutamakan landasan dan wawasan keagamaan bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dan wawasan keagamaan itu menurut Mukti Ali sesuai dengan watak kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan UUD 1945 dengan Pembukaannya kami berpendapat bahwa pendekatan terhadap UUD 1945 harus pendekatan agama. Ini berarti bahwa pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengertian agama, dan bukan pengertian falsafi. Hal ini disebabkan karena yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah "Allah", dan "Allah" adalah istilah agama, bukan istilah filsafat.

Penerimaan NU atas Pancasila ditegaskan di dalam Anggaran Dasar. NU menerima dengan "panjang-lebar"; ia menerima dengan sikap positif menerima dalam rangka perjuangan bangsa dan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Penerimaan atas Pancasila sudah dimuat di dalam Muqaddimah (Pembukaan) Anggaran Dasar, Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, organisasi Nahdlatul Ulama berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi ummat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah SWT sebagai inti aqidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah SWT.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Bandingkan, Supra, hlm. 103.

<sup>54</sup> Sidjabat, op. cit., hlm. 54.

<sup>55</sup> Ibid.,

<sup>56</sup> Ibid.,

<sup>57</sup> . Mukhtamar Situbondo, hlm. 152

### **Kesimpulan**

Nahdlatul Ulama' organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan menurut Azyumardi Azra, Nahdlatul Ulama' adalah organisasi islam terbesar di dunia. Organisasi ini terus melakukan pembenahan untuk memajukan internal organisasi. Secara kultural, NU masih tetap mempertahankan tradisi agama. Namun di balik itu, NU mengadakan modernisasi di dalam bentuk pemikiran, keintelektualan serta keorganisasian. Sumber ilmu yang dijadikan NU adalah kitab-kitab kuning (baca: klasik). Dengan demikian NU tidaklah stagnant menjadikannya sebagai referensi keilmuan. Namun sebaliknya, pemikiran orang-orang NU lebih modernisasi dari pada kelompok-kelompok tertentu yang muncul sebagai kelompok modernisasi. Dibiidang politik dan tata negara, organisasi NU lebih mudah menyesuaikan diri (akomodatif) dengan berbagai perubahan politik dibandingkan dengan ormas Islam manapun di negeri ini. NU lebih transparan, prosif bahkan lebih modernisasi dari pada ormas yang mengklaim diri sebagai golongan pembaharu. NU lebih menerima Pancasila sebagai Ideologi negara yang signifikan bagi kehidupan negara.

Disamping itu, Jaringan Islam Liberal (JIL) banyak didukung dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh NU, dengan meneruskan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Hal itu mencerminkan, bukti modernisasi NU di eksternal organisasi. Masuknya beberapa tokoh NU terhadap JIL, bukan berarti mereka mendapat ijin dari kultural dan tradisi NU. Akan tetapi, mereka melakukan demikian untuk mengubah pemikiran dan keintelektualan yang selalu identik dengan tradisionalisme.

### Daftar Pustaka

- 'Abduh, Muhammad, Rislah Taud, Terj. B. Michel dan Mustafa Abdul Raziq (Paris: t.t.p, 1925),
- A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini (Jakarta: Rajawali, 1988)
- Abdullah, Taufik, Islam dan Masyarakat (Jakarta: LP3S, 1996),
- Alfaruqi, Jabir, Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah. NU, Fundamentalisme, dan Liberalisme. harian Kompas, 28 Juli 2006
- Azra, Azyumardi, Suplemen Republika, Kamis, 14 Maret 2002,
- Donald Eugene Smith. Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Gazali, Hatim" Liberalisme, JIL dan NU Waria"
- Gellner , Ernest, Muslim Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 5.
- Haris, Syamsuddin, "Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU", Dalam Pesantren, No. 2/Vol.VIII/1991,
- Harun, Lukman, Muhammadiyah dan Asas Pancasila, (Jakarta Pustaka Panjimas, 1986)
- <http://artikelkondang.blogspot.com/2012/09/perkembangan-dan-dinamika-nu-nahdlatul.html>. dalam artikel NU dan Pesantren Tebuireng
- <http://gazali.wordpress.com/2010/06/05/liberalisme-jil-dan-nu-waria/>. Diases pada 13 Desember 2012.
- <http://teknologi.ee.itb.ac.id/content/membuka-kedok-tokoh-tokoh-liberal-dalam-tubuh-nu-karya-kh-muh-najih-maimoen>. diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Dalam pembahasan singkat dalam buku Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal dalam Tubuh NU karya KH. Muh. Najih Maimoen
- <http://yesimmoslem.blogspot.com/2012/05/melacak-jejak-pemikiran-gus-dur-1.html>. Diases pada 13 Desember 2012.

- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, di terjemahkan oleh M. Sadat Ismail dengan judul, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Cet, XI; Yogyakarta, Qalam; Juni 2005
- Jainuri , Achmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam Surabaya: LPAM*, 2004
- Kahmad , Dadang, *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah*
- M. Ali Haidar. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*
- Madjid, Nurcholish (1987), *Islam Kemodem-an dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban- Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Kemodernan*, Op.Cit, h
- Martin van Bruinessen. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa*
- Muhammad Azhar, *Fiqh Peradaban* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001)
- Mustofa, Imam, "Gus Dur dan Liberal NU", *Radar Lampung*. Rabu, 4 Januari 2012
- mutamakkin billa. *Masuknya modernisme barat dan islam di indonesia ; fase-fase kesadaran sosial-keagamaan*. PDF. Artikel
- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 1995),

Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Ronald, Alan Lukens Bull, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious identity Construction* (A Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy in Arizona State University, 1997)

Said Aqil Siradj .NU, *Tradisi dan Kebebasan Pikir*

Shepard, William, "Fundamentalism; Christian and Islamic, Religion, XVII (1987)

Toynbee, Arnold. dalam Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin*, Op.Cit,

Wahid , Abdurrahman. *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1978)

Wahid, Abdurrahman. *Persepsi Gerakan Islam Tentang Kebudayaan: Sebuah Tinjauan Dini Tentang Perkembangannya di Indonesia*, dalam, Alfian, ed., op. cit., hlm.

Watt, Montgomery, *Islamic Theolory and Philosophy*.